



Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus

ISSN: 2598-5183 (Print) ISSN: 2598-2508 (Electronic)

Journal homepage: <https://jpkk.ppi.unp.ac.id/index/jpkk>

Email: jpkk@ppi.unp.ac.id



Implementasi Tugas Guru Pembimbing Khusus Serta Kendala sebagai Tenaga Pendidik Profesional di Sekolah Inklusi Kota Surabaya

Nindya Ayu Rizqianti¹, Putri Kartika Ningsih², Ediyanto Ediyanto³, Asep Sunandar⁴
¹²³⁴Universitas Negeri Malang, Indonesia

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Terkirim, 22 Oktober 2021
Revisi, 29 Desember 2022
Diterima, 13 April 2022

Kata Kunci:

Pendidikan Inklusi;
Guru Pembimbing Khusus;
Profesionalisme

ABSTRAK

Guna memfasilitasi segala kebutuhan dan pelayanan anak berkebutuhan khusus maka sekolah perlu menambahkan guru pendamping khusus atau GPK. Sebuah sekolah dikatakan inklusif ditandai dengan adanya anak berkebutuhan khusus di sekolah umum. Beberapa kota di Indonesia telah melaksanakan pendidikan inklusif dan mendapatkan hasil yang beragam dalam pelaksanaannya. Untuk mewujudkan suatu pendidikan inklusi yang ideal, ada beberapa aspek yang perlu dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh, satu diantaranya adalah kompetensi dasar tenaga pendidik. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yaitu terungkapnya beberapa kendala implementasi pendidikan inklusif dan gambaran pengetahuan profesional dari GPK di sekolah dasar inklusi kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah guna terciptanya pendidikan inklusi yang ideal.

ABSTRACT

A school is said to be inclusively characterized by the presence of children with special needs in public schools. Several cities in Indonesia have implemented inclusive education and got mixed results in its implementation. To facilitate all the requirements and services of children with special needs, schools need to add special guidance teachers or GPK. In order to realize an excellent inclusive education, several aspects need to be appropriately managed and seriously, one of which is the basic competence of educators. The method in this research is descriptive qualitative. The study results revealed several obstacles to the implementation of inclusive education and a description of the professional knowledge of GPK in inclusive elementary schools in the city of Surabaya, which was in accordance with the needs of educators in schools to create an ideal inclusive education.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License. This license lets others remix, tweak, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms ©2018 by author and Universitas Negeri Padang.

Corresponding Author:

Ediyanto Ediyanto
Universitas Negeri Malang, Indonesia
Email: ediyanto.fip@um.ac.id

Pendahuluan

Pemerintah telah mengencangkan pendidikan wajib belajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar yang merupakan pelaksanaan dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Kini pendidikan di Indonesia semakin berkembang menjadi lebih baik, ditunjukkan dengan semakin berkembangnya pendidikan inklusi yang sudah ada hampir di semua jenjang dan berbagai kota. Perkembangan pendidikan inklusi merupakan upaya terpenuhinya hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam memperoleh pendidikan sesuai yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2013. Pentingnya pendidikan inklusi didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan adalah hak asasi semua manusia, selain itu pendidikan inklusi bermanfaat untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa sosial pada anak normal terhadap anak berkebutuhan khusus (Peters, 2003; Maulida, 2019; Fayaz, 2019).

Salah satu kriteria yang menunjukkan bahwa sebuah sekolah dikatakan inklusi ditandai dengan adanya anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Untuk memfasilitasi segala kebutuhan dan pelayanan anak berkebutuhan khusus maka sekolah perlu menambahkan tenaga pendidik khusus atau GPK (Edyanto et al., 2017; Ediyanto et al., 2018), guna menyusun program pembelajaran dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Hal tersebut penting dilaksanakan agar tercipta lingkungan belajar yang benar-benar inklusif.

Beberapa kota di Indonesia telah melaksanakan pendidikan inklusif dan mendapatkan hasil yang beragam dalam pelaksanaannya (Ediyanto et al., 2021). Seperti dalam penelitian yang dilakukan Indriawati (2013) di salah satu sekolah dasar inklusi di Batu menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan sumber daya finansial belum terpenuhi, hal tersebut terlihat dari implementasi tugas GPK yang belum sesuai ketika merancang dan melaksanakan program khusus bagi ABK. Sedangkan kekurangan sumber daya finansial mempengaruhi GPK dalam menemukan dan/atau memberikan bahan ajar yang tepat dalam pendidikan inklusif (Handayani & Rahadiyan, 2013; Setiawan et al., 2020).

Beberapa kendala lain dalam pendidikan inklusi juga terjadi di salah satu sekolah dasar di Bandung. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2017) di Bandung bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik dan efektif, yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah ABK yang diterima dan pengalokasian lulusan bagi ABK. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu ketersediaan sumber daya manusia atau guru pendidikan khusus yang mendampingi ABK, selain itu belum adanya standar kurikulum yang bisa disesuaikan dengan ABK.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam mewujudkan suatu pendidikan inklusi yang ideal, ada beberapa aspek yang perlu dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh, satu diantaranya adalah kompetensi dasar tenaga pendidik. Tujuan penelitian ini adalah diharapkan hasil penelitian mampu mengungkap kendala implementasi pendidikan inklusif dan mendeskripsikan pengetahuan profesional dari GPK di sekolah dasar inklusi kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah guna terciptanya pendidikan inklusi yang ideal.

Metode

Tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan hasil penelitian mampu mengungkap kendala implementasi pendidikan inklusif dan mendeskripsikan pengetahuan profesional dari GPK di sekolah dasar inklusi kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah guna terciptanya pendidikan inklusi yang ideal, maka metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif sesuai dengan pedoman penelitian Sugiyono (2011). Penelitian dilakukan dengan observasi serta wawancara terhadap tiga guru pendamping khusus yang bertugas di salah satu sekolah inklusi di Kota Surabaya dengan waktu pelaksanaan yang berbeda. Pelaksanaan wawancara dilakukan melalui telepon dan berkirim pesan menggunakan aplikasi

Whatsapp (daring) karena penelitian dilakukan ketika pandemic sehingga membatasi interaksi secara langsung.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Narasumber pada penelitian ini adalah seorang GPK di salah satu sekolah dasar inklusi di kota Surabaya, narasumber merupakan lulusan dari salah satu universitas terkemuka di Jawa Timur dengan jurusan pendidikan luar biasa pada tahun 2013, beliau menjadi GPK sejak tahun 2010. Sehingga pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif sudah diperoleh sejak kuliah dan diperoleh secara langsung dilapangan. Maka bukan hal yang sulit bagi narasumber untuk terjun di pendidikan inklusi. Akan tetapi menurut pengakuan narasumber, pelaksanaan pendidikan inklusi antara teori dan praktek itu berbeda. Dalam teori kita mudah untuk menyatakan bahwa pembelajaran bagi ABK dilakukan dengan memodifikasi berbagai perangkat pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi anak. Hal itu sebuah pernyataan yang tepat, dan disitulah tantangan yang dihadapi oleh GPK di lapangan dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi ABK dengan karakteristik ABK yang unik.

Tantangan dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi ABK yang diungkapkan oleh narasumber yaitu memerlukan berbagai penyesuaian baik berdasarkan karakteristik ABK, kesiapan belajar anak, gaya belajar anak, kondisi kelas, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kondisi ketersediaan GPK. Dalam penyesuaian materi pembelajaran bagi ABK dapat dilakukan dengan mudah karena narasumber memahami karakteristik ABK dan kondisi anak. Disisi lain kemudahan dalam memberikan layanan pendidikan bagi ABK tidak lepas dari fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dimana pihak dinas memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada sekolah serta memberikan pelatihan kepada sekolah pelaksana sekolah inklusif serta GPK.

Sejak tahun 2010 hingga 2020 sudah banyak pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan yang telah diikuti oleh GPK. Pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh narasumber adalah pelatihan terkait ilmu pendidikan inklusif, Implementasi pendidikan inklusif (teknis penerimaan peserta didik, identifikasi dan asesmen pada ABK, penyusunan PPI, modifikasi kurikulum, modifikasi pengajaran kepada ABK, penyediaan sarana prasarana bagi ABK), pelatihan fisioterapi, pelatihan membuat prakarya seperti membuat kerajinan membuat kain perca, membatik, pelatihan membuat media e-learning, membuat tas dengan merajut, dan berbagai pelatihan untuk kelas keterampilan dan vokasi bagi siswa berkebutuhan khusus, serta dari beberapa pelatihan tersebut ada beberapa pelatihan yang diulang-ulang setiap tahunnya.

Pelatihan implementasi pendidikan inklusif sering diulang-ulang, hal tersebut dilakukan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan GPK dalam pelaksanaan pendidikan inklusi yang tepat. Dan hasil dari pelatihan tersebut telah diterapkan dengan baik oleh sekolah dasar inklusi kota Surabaya tempat narasumber bekerja. Dibuktikan dengan jumlah ABK yang mendaftarkan diri sekolah diterima dengan baik oleh sekolah, walaupun sekolah menemui kendala dalam memberikan pelayanan kepada ABK. Kendala-kendala yang ditemui oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut: 1) tidak sebandingnya jumlah ABK dengan jumlah GPK; serta 2) guru reguler merasa kewalahan untuk mengontrol siswa ABK di kelas reguler. Disisi lain ada keberhasilan implementasi pendidikan inklusi di salah satu sekolah dasar inklusi kota Surabaya tempat narasumber bekerja karena: 1) penerimaan yang baik oleh seluruh warga sekolah; 2) kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orangtua; 3) adanya kerjasama antara guru reguler dengan GPK; serta 4) lingkungan yang nyaman bagi ABK; 5) serta tidak ada diskriminasi bagi ABK. Implementasi pelatihan fisioterapi di sekolah inklusi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pelatihan fisioterapi yang diberikan tidak dapat diterapkan karena tidak ada siswa tunadaksa, serta tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk fisioterapi.

Implementasi pelatihan membuat kerajinan kain perca, dan membatik telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi menurut narasumber ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut adalah: 1) tidak sesuainya tingkat kemampuan siswa sekolah dasar khususnya anak berkebutuhan khusus dalam membuat kerajinan kain perca, membuat tas rajut, dan membatik; 2) dalam pembuatan kerajinan kain perca dan membatik menggunakan benda-benda berbahaya, maka ABK perlu diawasi dengan ketat sedangkan jumlah GPK terbatas; 3) bagi siswa autis memerlukan pendampingan 2 GPK untuk mengawasi dan membimbing ABK, sedangkan siswa lain memerlukan pendampingan pula. Maka dalam pelaksanaannya hampir sepenuhnya guru yang menyelesaikan prakarya beberapa ABK.

Pelatihan membuat media e-learning, yang telah diikuti oleh narasumber belum berjalan dengan baik. Karena GPK kewalahan jika selalu membuat media e-learning terus menerus, maka GPK menggunakan media pembelajaran yang telah tersedia yang telah sesuai bagi ABK.

Pada masa pandemi sejak tahun 2020 hingga 2021, pelatihan-pelatihan tetap diberikan oleh Dinas dengan bekerjasama dengan beberapa vendor yang mempersiapkan pelatihan melalui webinar. Karena pelaksana dilakukan oleh vendor bukan oleh Dinas Pendidikan secara langsung, maka narasumber merasa tidak diwajibkan untuk mengikutinya. Tak hanya itu, menurut narasumber durasi pelaksanaan webinar berlangsung cukup lama, sedangkan narasumber tidak hanya memikirkan pekerjaan saja melainkan narasumber juga memiliki tanggung jawab dengan urusan rumah tangga, serta keterbatasan kuota yang dimiliki memperkuat narasumber untuk tidak mengikuti pelatihan tersebut.

Implementasi Tugas GPK sebagai Tenaga Pendidik Profesional di Sekolah Inklusif Kota Surabaya

Pendidikan inklusi merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Diperkuat dengan pendapat Zakia, (2015) Pendidikan inklusi merupakan suatu alternatif, pilihan, inovasi, atau terobosan baru/pendekatan baru disamping pendidikan segregasi. Sekolah penyelenggara Pendidikan inklusi perlu didukung oleh tenaga Pendidikan dengan keahlian. Zakia, (2015) menuturkan bahwa sekolah inklusi perlu didukung oleh tenaga pendidik dengan keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan siswa berkebutuhan khusus, salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah Guru Pendamping Khusus (GPK). Guru pendamping khusus sesuai dengan pedoman penyelenggara Pendidikan inklusi tahun 2007 (Berlinda, 2018) bahwa GPK adalah guru yang memiliki latar belakang Pendidikan khusus/ Pendidikan luar biasa atau yang pernah memperoleh pelatihan tentang Pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusi. Menurut Witasoka (2016) implementasi yang baik pada sekolah inklusi, kepala sekolah melakukan interaksi langsung pada GPK.

Bukan tanpa alasan, GPK harus memiliki latar belakang Pendidikan khusus/Pendidikan luar biasa. Rajab, (2018) menuturkan bahwa tugas pokok GPK adalah: 1) membangun sistem koordinasi dan kolaborasi antar inter tenaga Pendidikan dan kependidikan, serta masyarakat; 2) membangun jejaring kerja antar Lembaga; 3) melaksanakan case conference (bedah kasus); Menyusun instrumen asesmen akademik dan nonakademik; 4) menyusun program pembelajaran individual bagi peserta didik; 5) Menyusun program layanan kompensatoris bagi peserta didik berkebutuhan khusus; 6) melaksanakan pendampingan dan/atau pembelajaran akademik bagi peserta didik berkebutuhan khusus; 7) memberikan bantuan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus berupa remedial maupun pengayaan; 8) melaksanakan pembelajaran khusus di ruang sumber bagi peserta didik yang membutuhkan; 9) melaksanakan layanan kompensatoris sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik; 10) memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus.

Pemenuhan tenaga GPK dengan latar belakang Pendidikan khusus/pendidikan khusus tentunya akan memberikan kemudahan sekolah dalam mencapai tujuan dari Pendidikan inklusi. Pelaksanaan Pendidikan inklusi di salah satu sekolah inklusi di kota Surabaya telah melibatkan GPK dengan latar belakang Pendidikan luar biasa. Sejalan dengan peraturan terkait kualifikasi tenaga GPK, salah satu sekolah inklusi di kota Surabaya telah menyediakan tenaga GPK dengan latar belakang Pendidikan luar biasa/Pendidikan khusus. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan seorang GPK, bahwa terdapat dua orang GPK yang memiliki latar belakang Pendidikan luar biasa dari salah satu universitas negeri terbaik di Jawa Timur.

Kendala Pelaksanaan Tugas GPK sebagai Tenaga Pendidik Profesional di Sekolah Inklusif Kota Surabaya

Pelaksanaan Pendidikan inklusi tentunya memiliki berbagai kendala dan menjadi tantangan tersendiri bagi GPK, menurut penuturan narasumber dalam memberikan pelayanan Pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus memerlukan penyesuaian-penyesuaian baik penyesuaian karakteristik ABK, kesiapan belajar anak, gaya belajar anak, kondisi kelas, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kondisi ketersediaan GPK. Karena GPK memiliki pengalaman baik secara teori dan lapangan, hal tersebut bukanlah hal baru. Guna mencapai tujuan pelayanan Pendidikan inklusi, dinas Pendidikan kota Surabaya memberikan pelatihan-pelatihan kepada GPK guna meningkatkan kompetensi sebagai tenaga Pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus. Sejalan dengan pendapat Agustin, (2017) bahwa dengan memberikan pelatihan mampu meningkatkan kompetensi guru GPK dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang profesional.

Berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas Pendidikan kota Surabaya telah diikuti oleh narasumber. Mulai dari pelatihan implementasi Pendidikan inklusi, membuat prakarya, vokasional, dan sebagainya. Pelatihan merupakan bagian dari suatu proses pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan khusus seseorang atau sekelompok orang (Notoatmodjo, 2003). Kondisi tersebut juga ditemukan dalam penelitian Edward, C., dkk. (2018) bahwa guru dan kepala sekolah mengalami kendala dalam penyusunan perangkat pembelajaran khususnya pembelajaran Bahasa Indonesia, namun melalui kegiatan KKG dapat membantu guru kelas dalam merancang pembelajaran dalam *setting* inklusi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui pelatihan dapat memberikan solusi pada setiap kendala yang ditemui. Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Irdamurni, I., dkk (2019) bahwa guru yang mengikuti pelatihan pengembangan RPP mampu mengembangkan RPP anak berkebutuhan khusus *setting* inklusi, sedangkan guru belum dapat membuat PPI bagi ABK karena guru belum mendapatkan pelatihan pengembangan PPI, hal ini menunjukkan pelatihan sangat diperlukan untuk mencapai Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus *setting* inklusi. Hal tersebut membentuk sebuah asumsi dengan meningkatkan kemampuan atau keterampilan maka akan meningkatkan kinerja orang tersebut.

Tujuan diadakannya kegiatan pelatihan implementasi pendidikan inklusi yaitu membahas secara lebih rinci segala hal yang berkaitan tentang kurikulum, pembelajaran, sarana pendukung pembelajaran hingga layanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi sehingga pengetahuan GPK semakin matang. Pelatihan yang diberikan untuk GPK dengan latar belakang PLB dirasa lebih efektif dibandingkan dengan guru kelas reguler, sesuai dengan pernyataan Mumpuniarti & Lestari(2018) dalam penelitiannya tentang kesiapan guru reguler dibanding GPK di sekolah inklusi, menunjukkan bahwa guru reguler selain jenjang TK belum siap mengajar siswa

berkebutuhan khusus terlihat dari pernyataannya yang tergantung dan mengandalkan GPK serta meminta sarana prasarana akomodasi yang lengkap.

Selain pelatihan implementasi pendidikan inklusi, perlu dilakukan juga pelatihan prakarya untuk GPK karena banyak manfaat yang akan di dapat dari kegiatan tersebut. Melalui kegiatan pelatihan prakarya yang dilakukan maka kemampuan guru akan semakin meningkat sehingga dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya untuk menghasilkan sebuah produk yang memiliki nilai jual. Selain itu, GPK juga dapat membantu peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengasah kreatifitas dan menciptakan jiwa wirausaha peserta didik dengan mengkombinasikan pengetahuan tentang karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus dan pengetahuan prakarya sehingga kegiatan keterampilan prakarya untuk anak berkebutuhan semakin maksimal dan sesuai.

Kegiatan pelatihan yang perlu dilakukan guru untuk membantu peserta didik mempersiapkan masa depannya adalah melalui pelatihan vokasional. Kemampuan vokasional sangatlah dibutuhkan terutama siswa berkebutuhan khusus. Iswari (2007) menyatakan maksud dari keterampilan vokasional bagi peserta didik berkebutuhan khusus adalah mempersiapkan masa depan agar dapat bekerja dan menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri dengan cara meningkatkan kemampuan sesuai bakat dan minatnya sehingga muncul jiwa wirausaha, semangat kerja, dan bermanfaat. Agar siswa memiliki kemampuan vokasional yang mumpuni maka diperlukan guru yang lebih mumpuni pula, maka penting sekali guru dibekali kemampuan vokasional melalui kegiatan pelatihan.

Pelatihan membuat media e-learning untuk GPK bertujuan agar GPK dapat membantu peserta didik berkebutuhan khusus menghadapi tantangan abad 21 sesuai alasan disusunnya kurikulum nasional (kurikulum 2013) yang bercirikan penguasaan informasi, media dan teknologi dengan menguasai kemampuan melek informasi, media dan TIK (Yuliyati, 2016). Penggunaan TIK dalam dunia pendidikan semakin pesat pada masa pandemi covid-19 ini, banyak pelatihan dan kegiatan pendidikan lainnya dilakukan dengan daring.

Beberapa kendala yang mengganggu proses pelatihan daring menurut Rahman (2020) diantaranya perangkat elektronik seperti HP atau komputer yang kurang kompatibel dengan kebutuhan kegiatan pelatihan, terbatasnya jaringan internet dan kuota, dan aliran listrik yang terputus tanpa terduga. Upaya yang perlu dioptimalkan untuk menciptakan pelatihan daring yang maksimal berdasarkan penelitian yang dilakukan Akhmadi (2020) diantaranya adalah pembenahan sistem/aplikasi, fasilitator, waktu pelaksanaan, dan perlunya mengadaptasi unsur-unsur pembelajaran konvensional untuk melengkapi pendalaman materi pelatihan dengan pembelajaran klasikal.

Problematika implementasi pendidikan inklusi di lapangan tidak hilang hanya dengan adanya berbagai pelatihan untuk guru maupun peserta didik. Salah satu problem yang umum terjadi yaitu jumlah GPK yang tidak sebanding dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Pasal 10 tentang pendidikan inklusi menyatakan bahwa guru pembimbing khusus (GPK) yang berada di sekolah pendidikan inklusi paling sedikit 1 orang guru. Meski belum ada peraturan jelas berapa rasio peserta didik berkebutuhan khusus dan GPK yang seharusnya, namun beracuan pada Peraturan Mendiknas Nomor 33 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana dinyatakan bahwa kapasitas maksimum adalah 5 peserta didik untuk ruang kelas SDLB, sehingga dapat disimpulkan bahwa guru peserta didik khusus dalam satu kelas seyogyanya maksimal mendampingi 5 peserta didik khusus begitu pula seharusnya berlaku untuk GPK di sekolah inklusi. Sebaiknya dalam pendidikan inklusi satu GPK maksimal mendampingi 5 peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, fakta di lapangan masih banyak GPK yang mendampingi lebih dari 5 peserta didik berkebutuhan khusus. Seperti yang terjadi di lembaga tempat narasumber bekerja, dalam satu sekolah terdapat 30 peserta didik berkebutuhan khusus

dengan 2 GPK. Sehingga rasio antara peserta didik berkebutuhan khusus dan GPK di sekolah tersebut kurang seimbang yang berdampak pada pelayanan yang didapat peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah. Keterbatasan jumlah guru pembimbing khusus ini merupakan salah satu kendala di sekolah inklusi (Mayasari, 2016; Sulthon, 2019), sehingga dalam pelaksanaannya kurang efisien.

Tidak sebandingnya jumlah GPK dengan jumlah PDBK yang ditemui di salah satu sekolah inklusi di kota Surabaya, menimbulkan kendala dalam mengimplementasikan hasil pelatihan-pelatihan yang diperoleh oleh GPK baik pelatihan vokasional maupun membuat berbagai prakarya. Sesuai dengan pengakuan narasumber bahwa, GPK kewalahan jika memberikan pelatihan membuat batik bagi peserta berkebutuhan khusus dengan teman sekelasnya, ketika peserta didik dihadapkan dengan berbagai peralatan, peserta didik sulit untuk fokus dan aktif sendiri jika mengikuti kelas membuat batik bersama dengan teman-temannya sehingga batik yang diajarkan tidak dapat diselesaikan. Menurut pengakuan narasumber, peserta didik memerlukan pendampingan khusus serta pemantauan secara intens. Peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang SD memerlukan pendampingan oleh GPK dan suasana tenang untuk mampu berkonsentrasi.

Kesimpulan

Pemenuhan tenaga GPK dengan latar belakang Pendidikan khusus/pendidikan luar biasa tentunya akan memberikan kemudahan sekolah dalam mencapai tujuan dari Pendidikan inklusi. Salah satu faktor agar sekolah mudah mencapai tujuan pendidikan inklusi setidaknya sekolah merekrut GPK dengan latar belakang Pendidikan khusus/pendidikan luar biasa atau setidaknya pernah memperoleh pelatihan tentang pendidikan khusus/pendidikan luar biasa. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas GPK sebagai tenaga pendidik profesional di sekolah inklusi kota Surabaya yaitu sulitnya mengimplementasikan hasil pelatihan yang diikuti oleh GPK yang diselenggarakan oleh dinas Pendidikan kota Surabaya kepada peserta didik berkebutuhan khusus.

Daftar Rujukan

- Agustin, I. S. (2017). Pelatihan program pembelajaran individual (PPI) bagi guru pembimbing khusus (GPK) se kabupaten tuban. *Prosiding SNasPPM*, 1(1), 135-139.
- Akhmadi, A. (2020). Evaluasi Pelatihan Jarak Jauh Di Masa Pandemi. *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(2), 136-144.
- Berlinda, L. M. (2018). Kompetensi Komunikasi Guru Pendamping Khusus di Sekolah Inklusi. *Interaksi Online*, 6(4), 411-422.
- Ediyanto, E., Atika, I. N., Kawai, N., & Prabowo, E. (2017). Inclusive Education in Indonesia from the Perspective of Widyaiswara in Centre for Development and Empowerment of Teachers and Education Personnel of Kindergartens and Special Education. *IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies*, 4(2), 104-116.
- Ediyanto, E., Mulyadi, A., Supriatna, A., & Kawai, N. (2018). The education and training program guideline for special guidance teacher competence development in Indonesian inclusive school. *IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies*, 5(2), 251-267.
- Ediyanto, E., Setiawan, A., Handaka, I. B., Rofiah, N. H., & Suhendri, S. (2021). Implementation of Inclusive Education in Learning Process at Senior High School Malang City, Indonesia. *IJDS: INDONESIAN JOURNAL OF DISABILITY STUDIES*, 8(1), 179-189.

-
- Edward, C., Sopandi, A., & Kasiyati, K. (2018). Pengelolaan Kelas Inklusif dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Anak Berkeasulitan Belajar. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 2(1), 53-58. Retrieved from <http://jpkk.ppj.unp.ac.id/index.php/jpkk/article/view/307>
- Fayaz, R. (2019). Inclusive Education In India: Concept, Need And Benefits. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR)*, 2(3), 71-81.
- Handayani, T., & Rahadian, A. S. (2013). Peraturan perundangan dan implementasi pendidikan inklusif. *Masyarakat Indonesia*, 39(1), 149701.
- Indriawati, P. (2013). Implementasi Kebijakan Tugas Guru Pembimbing Khusus pada Pendidikan Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 1(1), 49-54.
- Iswari, M. (2007). Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.
- Irdamurni, I., Iswari, M., & Sopandi, A. (2019). Pelatihan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif bagi Guru SD dan SLB di Kepulauan Mentawai. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 3(2), 13-16. <https://doi.org/10.24036/jpkk.v3i2.540>
- Kemendiknas. (2008). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
- Maulida, E. (2019). Lesson of Inclusive Education Implementation in Jakarta: Availability and Accessibility Issues. *Education Quarterly Reviews*, 2(1), 172-184.
- Mayasari, M. (2016). Implementasi Kurikulum 2013 Pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 3(1), 1-18.
- Mumpuniarti, M., & Lestari, P. H. K. (2018). Kesiapan guru sekolah reguler untuk implentasi pendidikan inklusif. *JPK (Jurnal Pendidikan Khusus)*, 14(2), 57-61.
- Notoatmodjo, S. (2003). Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Permendiknas No 70 tahun 2009 Mengenai Pendidikan Inklusif
- Peters, S. J. (2003). Inclusive education: Achieving education for all by including those with disabilities and special education needs. Washington, The World Bank, 26690, 1-133.
- Rahman, T. (2020). Pembelajaran Daring di Era Covid-19. *Osf.io*
- Rajab, A. (2018). Tugas pokok guru pembimbing khusus (GPK) di sdn surabaya. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 10(4), 1-48.
- Setiawan, H., Oktaviyanti, I., Jiwandono, I. S., Affandi, L. H., Ermiana, I., & Khair, B. N. (2020). Analisis Kendala Guru Di SDN Gunung Gatep Kab. Lombok Tengah Dalam Implementasi Pendidikan Inklusif. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 20(2), 169-183.
- Sulthon, S. (2019). Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Pati: Harapan dan Kenyataan. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 6(1), 151-172.
- Wijayanti, A. A. (2017). Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Dalam Lingkup Sekolah Inklusi (Studi Kasus: SD No. 11 Jimbaran). *Citizen Charter*, 1(1), 165121.

- Witasoka, D. (2016). Manajemen Pendidikan Inklusif SMA Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 3(2), 163-192.
- Yuliyati, Y. (2016). E-learning as tools and strategies of literacy instruction based balance literacy for students with learning disabilities in inclusive school. *Jurnal TEKPEN*, 1(3).
- Zakia, D. L. (2015, November). Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi. In *Seminar Nasional Ilmu Pendidikan UNS 2015*, Sebelas Maret University.